

**PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD OLEH  
BIDANG ANGGARAN DAERAH DI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Diajukan oleh:**

**MITHA MIRANDA**

**NIM. 07011282126095**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA 2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD OLEH  
BIDANG ANGGARAN DAERAH DI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

**Oleh:**

**MITHA MIRANDA**

**NIM. 07011282126095**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 03 Maret 2025**

**Pembimbing**

**Dr. Lili Erina, M.Si  
NIP. 196612301992032001**



**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PENGOORDINASIAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD OLEH  
BIDANG ANGGARAN DAERAH DI BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**MITHA MIRANDA**  
NIM. 07011282126095

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 17 Maret 2025

Pembimbing :

**Dr. Lili Erina, M.Si**  
NIP.196612301992032001

Tanda Tangan



---

Penguji :

**Drs. Mardianto, M.Si**  
NIP. 196211251989121001

Tanda Tangan



---



---

**Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198902222023212044

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan  
Administrasi Publik,



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mitha Miranda

Nim : 07011282126095

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palembang, 03 Maret 2025



Mitha Miranda

NIM. 07011282126095

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

*“It always seems impossible until it's done”*

(Nelson Mandela)

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya  
persembahkan kepada:

1. Kepada kesua orang tua saya, Bapak  
Purwadi dan Ibu Sri Sukarni.
2. Kepada kedua saudariku, Devy Meilinda  
dan Suci Ramadini.
3. Dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Lili  
Erina, M.Si.
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI.
5. Teman-teman Administrasi Publik 2021.
6. Almamater kuning kebanggaan,  
Universitas Sriwijaya.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the coordination of the preparation of SKPD Budget Implementation Documents by the Regional Budget Division at the Palembang City Regional Financial and Asset Management Agency, using the concept of Hasibuan coordination factors, namely unity of action, communication, division of labor, and discipline. The data collection method used is qualitative with data collection techniques taken from interviews, documentation, and observation. The informants of this research consisted of eight people who were considered to be able to provide detailed information regarding the coordination of the preparation of DPA-SKPD by the Regional Budget Division. The results showed that in coordinating the preparation of SKPD Budget Implementation Documents by the Regional Budget Division in BPKAD Palembang City, it can be said that it is not good, because it has not fulfilled the four coordination factors according to Hasibuan. There are problems, especially related to SKPDs that have not been optimal in following up on DPA verification, lack of timeliness, and technical obstacles that hinder coordination. Therefore, improvements are needed in the aspects of external coordination, SKPD understanding of regulations, timeliness, and optimization of information systems to improve good coordination in coordinating the preparation of DPA-SKPD.*

**Keywords: Coordination, DPA, SKPD**

**Advisor,**

**Dr. Lili Erina, M.Si**  
**NIP.196612301992032001**



---

**Palembang, 17 March 2025**

**Chairman of The Public Administration Department**

**Faculty of Social and Political Science**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP.196911101994011001**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan menggunakan konsep faktor koordinasi Hasibuan, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data diambil dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian ini terdiri dari delapan orang yang dianggap dapat memberikan informasi terperinci mengenai pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang dapat dikatakan kurang baik, karena belum memenuhi keempat faktor koordinasi menurut Hasibuan. Terdapat permasalahan khususnya terkait dengan SKPD yang belum optimal dalam menindaklanjuti verifikasi DPA, kurangnya ketepatan waktu, serta kendala teknis yang menghambat jalannya pengoordinasian. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek koordinasi eksternal, pemahaman SKPD terhadap regulasi, ketepatan waktu, serta optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan pengoordinasian yang baik dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD.

**Kata Kunci: Pengoordinasian, DPA, SKPD**

**Pembimbing,**

**Dr. Lili Erina, M.Si**  
**NIP.196612301992032001**



**Palembang, 17 Maret 2025**

**Ketua Jurusan Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
**NIP.196911101994011001**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul “Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang” dengan baik tanpa halangan tertentu guna menyelesaikan studi di jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Tidak lupa shalawat serta salam yang selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Purwadi dan Ibu Sri Sukarni. Do'a dan dukungan mereka menjadi motivasi terbesar penulis untuk menjalani kehidupan hingga mampu menempuh pendidikan sampai saat ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menjelaskan betapa bersyukur penulis memiliki kedua orang tua yang selalu mendukung semua cita-cita yang dimiliki oleh penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua kakak penulis yaitu saudari Devy Meilinda dan Suci Ramadini yang juga selalu mendukung penulis dalam segala situasi. Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan berbagai pelajaran serta pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
3. Ketua Jurusan Administrasi Publik, Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyo, S. Sos., MPA.
4. Sekretaris Jurusan Administrasi Publik juga sebagai Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si.
5. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si dan Ibu Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji pada ujian skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.



8. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam mengurus surat-surat kelengkapan selama menjalani masa pendidikan maupun pada saat proses penelitian.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, selaku tempat penelitian yang telah memberikan izin dan kemudahan saat proses penelitian berlangsung.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang telah bersedia memberikan izin sebagai instansi tambahan dalam proses kelengkapan data.
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, yang telah bersedia memberikan izin sebagai instansi tambahan dalam proses kelengkapan data.
12. Kecamatan Kertapati Kota Palembang, yang telah bersedia memberikan izin sebagai instansi tambahan dalam proses kelengkapan data.
13. Muhammad Rafa Athallah yang selalu memberikan dukungannya dan menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama penyusunan skripsi.
14. Dinda, Anggi, Sucay, Deyak, Acil, Sucir, Dian, Mifta, Maysa, Nysa, Kai, Lily, Desi, Dwi, Ica, selaku teman dekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta masukan selama proses penyusunan skripsi.
15. Seluruh anggota Blounthies, yang telah memberikan banyak kenangan berharga selama perkuliahan berlangsung.
16. Teman-teman Jurusan Administrasi Publik Tahun 2021 yang senantiasa mendukung penulis.
17. Rekan-rekan mahasiswa serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Skripsi ini telah penulis susun dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membantu dalam proses perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Demikianlah yang ingin penulis sampaikan, terima kasih atas perhatian dan dukungannya.

Palembang, 03 Maret 2025

Hormat Penulis



Mitha Miranda

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan dan Manfaat .....	7
1.3.1    Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1    Landasan Teori .....	9
2.1.1    Pengoordinasian .....	9
2.1.2    Faktor Pengoordinasian.....	13
2.1.3    Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD .....	14

2.2	Penelitian Terdahulu.....	18
2.3	Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Definisi Konsep.....	25
3.3	Fokus Penelitian.....	26
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5	Informan Penelitian.....	29
3.5.1	Key Informan .....	29
3.5.2	Informan.....	29
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7	Teknik Analisis Data .....	32
3.8	Jadwal Penelitian.....	33
3.9	Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>35</b>
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian .....	35
4.1.1	Gambaran Umum Instansi.....	35
4.1.2	Visi dan Misi Instansi.....	36
4.1.3	Struktur Organisasi.....	37
4.1.4	Bidang Anggaran Daerah .....	38
4.1.5	Data Pegawai Bidang Anggaran Daerah .....	40
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	41
4.3	Hasil Penelitian .....	41
4.3.1	Analisis Faktor Kesatuan Tindakan pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang. .....	43

4.3.1.1	Analisis Satu Rencana pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	43
4.3.1.2	Analisis Satu Tujuan pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD..	49
4.3.1.3	Analisis Satu Atasan pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD..	53
4.3.2	Analisis Faktor Komunikasi pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang.....	59
4.3.2.1	Analisis Komunikator pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	59
4.3.2.2	Analisis Informasi pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	63
4.3.2.3	Analisis Saluran pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD.....	70
4.3.2.4	Analisis Komunikasi pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD..	81
4.3.2.5	Analisis <i>Feedback</i> pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	91
4.3.3	Analisis Faktor Pembagian Kerja pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang.	98
4.3.3.1	Analisis Pekerjaan pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	99
4.3.3.2	Analisis <i>Delegator</i> pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	106
4.3.3.3	Analisis <i>Delegate</i> pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD	111
4.3.4	Analisis Faktor Disiplin pada Pengoordinasian Penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang .....	118

4.3.4.1 Analisis Peraturan yang telah Ditetapkan pada Pengeordinasian Penyusunan DPA-SKPD .....	119
4.3.4.2 Analisis Peraturan Dihormati pada Pengeordinasian Penyusunan DPA-SKPD.....	123
4.3.4.3 Analisis Peraturan Dipatuhi pada Pengeordinasian Penyusunan DPA-SKPD.....	127
4.3.4.4 Analisis Peraturan Dilaksanakan Sepenuhnya pada Pengeordinasian Penyusunan DPA-SKPD .....	133
4.4 Pembahasan.....	140
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>150</b>
5.1 Kesimpulan .....	150
5.2 Saran.....	152
5.2.1 Saran Praktis.....	152
5.2.2 Saran Teoritis.....	153
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>154</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>156</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Penelitian Sebelumnya .....</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 2. Fokus Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 3. Informan Penelitian Yang Diperlukan.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4. Jadwal Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 5. Data Pegawai Bidang Anggaran Daerah .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 6. Identitas Informan Peneliitian.....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 7. Data SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kota Palembang.....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 8. Daftar Pembagian Tugas Bidang Anggaran Daerah .....</b>	<b>115</b>
<b>Tabel 9. Matriks Temuan Penelitian.....</b>	<b>145</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran .....	23
Gambar 2. Triangulasi Data Sugiyono (2013) .....	30
Gambar 3. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	32
Gambar 4. Foto Gedung BPKAD Kota Palembang .....	35
Gambar 5. Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang .....	37
Gambar 6. Proses Verifikasi DPA .....	47
Gambar 7. DPA-SKPD yang sudah Terverifikasi .....	52
Gambar 8. Bapak Fitriani Alexandy selaku Kepala Bidang Anggaran Daerah .	56
Gambar 9. Rapat Bidang Anggaran Daerah dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang.....	62
Gambar 10. Sosialisasi Sistem dan Prosedur di Hotel Harper .....	68
Gambar 11. Buku Pedoman Sistem dan Prosedur dibagikan Kepada OPD .....	69
Gambar 12. Sosialisasi Bidang Anggaran Daerah Kepada SKPD di Hotel Harper .....	72
Gambar 13. Ruang Rapat Raden Hanan Lantai 4.....	73
Gambar 14. Rapat Internal Bidang Anggaran.....	73
Gambar 15. Grup Whatsapp untuk Koordinasi .....	74
Gambar 16. Tampilan Awal Website SIPD-RI .....	79
Gambar 17. Tampilan Proses Pendaftaran SIPD-RI.....	79
Gambar 18. Tampilan Isi Website SIPD-RI.....	80
Gambar 19. Koordinasi Ketidaksesuaian Dokumen SKPD.....	90
Gambar 20. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan SKPD .....	93
Gambar 21. Contoh Berita Acara.....	94
Gambar 22. Proses Verifikasi Dokumen SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah .....	103
Gambar 23. Rancangan yang Terverifikasi .....	103
Gambar 24. Rancangan yang Tidak Terverifikasi.....	104
Gambar 25. Revisi Rancangan yang Belum Diperbaiki.....	104
Gambar 26. Pembagian Koordinator SKPD .....	109
Gambar 27. Data Pembagian koordinator SKPD ditempel di Meja Pegawai .	110
Gambar 28. Permendagri No. 77 Tahun 2020 .....	122

<b>Gambar 29. Rancangan dan Verifikasi Rancangan DPA-SKPD.....</b>	<b>131</b>
<b>Gambar 30. Wawancara Bersama Informan I<sub>1</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 31. Wawancara Bersama Informan I<sub>2-A</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 32. Wawancara Bersama Informan I<sub>2-B</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 33. Wawancara Bersama Informan I<sub>3-A</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 34. Wawancara Bersama Informan I<sub>3-B</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 35. Wawancara Bersama Informan I<sub>4-A</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 36. Wawancara Bersama Informan I<sub>4-B</sub>.....</b>	<b>156</b>
<b>Gambar 37. Wawancara Bersama Informan I<sub>4-C</sub>.....</b>	<b>156</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Wawancara .....	156
Lampiran 2. Pedoman Wawancara Bidang Anggaran Daerah .....	157
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Dinas Lain .....	162
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi.....	163
Lampiran 5. Pedoman Observasi .....	164
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian .....	165
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Seminar Proposal.....	166
Lampiran 8. Lembar Persetujuan Seminar Proposal.....	167
Lampiran 9. Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	168
Lampiran 10. SK Skripsi.....	169
Lampiran 11. Bukti Turnitin UNSRI .....	171
Lampiran 12. Bukti Lulus Tes USEPT.....	172

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kabid	: Kepala Bidang
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
OPD	: Organisasi Pemerintah Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwali	: Peraturan Wali Kota
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIPD-RI	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia
Sisdur	: Sistem dan Prosedur
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengoordinasian atau koordinasi merupakan kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2011:85). Menurut Mooney & Railey, koordinasi merupakan aspek penting dalam organisasi. Koordinasi merupakan “induk” dari berbagai prinsip lainnya, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi yang saling berbeda tetapi saling terintegrasi dalam organisasi secara lancar (Supriyadi, 2023:38).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu proses pemberian informasi untuk menyatukan tujuan diantara setiap elemen organisasi agar tercapainya tujuan organisasi. Menurut Hasibuan (2011) (dalam Maryana, 2023:67), terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, yaitu: 1) kesatuan tindakan, 2) komunikasi, 3) pembagian kerja, dan 4) disiplin. Faktor inilah yang dapat menjadi tolak ukur seberapa baik dalam pelaksanaan koordinasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai koordinasi menggunakan faktor hasibuan pada Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang. Berdasarkan penelitiannya dinyatakan bahwa koordinasi di BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah telah dilaksanakan namun masih belum sangat baik, dikarenakan terdapat kendala dari teknologi dan juga pegawai

(Kusdinar et al., 2023). Faktor hasibuan juga digunakan pada penelitian mengenai Koordinasi Antar SKPD Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang Mengganggu Lalu Lintas di Kota Makassar. Hasil penelitian koordinasi antar SKPD di Kota Makassar dalam menanggulangi PKL, yang mengganggu arus lalu lintas adalah dengan mengadakan pemantapan konfirmasi, pembentukan tim terpadu, sinergitas tiap instansi, rutin mengadakan sosialisasi diskusi umum, pengecekan petugas di lapangan, dan melakukan pembinaan secara intens (Citra et al., 2020). Sejalan dengan penelitian mengenai Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (*Ambulance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hal-hal dalam koordinasi yang belum berjalan maksimal. Diantaranya yaitu komunikasi dan kemampuan pegawai. SDM dinilai kurang memadai dengan jumlah petugas yang belum optimal (Andry et al., 2023). Kemudian mengenai Koordinasi Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dalam Meningkatkan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori. Hasil koordinasi dari penelitian dinilai belum optimal. Permasalahan ini disebabkan karena komunikasi yang kurang baik, sarana dan prasarana belum memadai dan belum terjadinya kerja sama yang baik antara pimpinan dan bawahan (Hasim et al., 2024). Jurnal tentang Koordinasi dalam Penertiban Bangunan Liar di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara yang sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya (Savira et al., 2023).

Melalui hasil analisis pada beberapa penelitian terdahulu tersebut menerangkan bahwa masih adanya permasalahan yang menghambat terkait pengoordinasian atau koordinasi didalam pelaksanaannya. Pengoordinasian menjadi salah satu daya tarik

penulis untuk meneliti lebih dalam. Dikarenakan penulis ingin melihat permasalahan yang terjadi dalam Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Salah satu bidang yang terdapat di BPKAD Kota Palembang adalah Bidang Anggaran Daerah. Menurut Perwali Palembang No 49 Tahun 2022 menjelaskan fungsi dari Bidang Anggaran Daerah, yaitu:

- 1) pengoordinasian Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- 2) pengoordinasian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- 3) pengoordinasian penyusunan Rencana kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 4) pengoordinasian penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5) pengoordinasian penyusunan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 6) pengoordinasian penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- 7) pengoordinasian kebijakan administrasi anggaran daerah;
- 8) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugasnya.

Fungsi Bidang Anggaran Daerah sebagaimana yang tertulis dalam Perwali tersebut, salah satunya adalah Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan lainnya tentang Pedoman Penyusunan APBD yaitu Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD Bidang Anggaran Daerah menjadi koordinator dalam memverifikasi DPA yang dibuat SKPD untuk diserahkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Bidang Anggaran Daerah juga sebagai koordinator untuk memberikan informasi-informasi terkait penyusunan DPA kepada SKPD. Informasi ini dapat berupa menginformasikan dokumen, peraturan, serta arahan terkait penyusunan DPA kepada SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat menjadi DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Alur prosedur dalam penyusunan DPA-SKPD terbagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- 1) Pemberitahuan penyusunan rancangan DPA-SKPD
- 2) Penyusunan rancangan DPA-SKPD
- 3) Penyampaian rancangan DPA-SKPD dan verifikasi DPA-SKPD
- 4) Persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD

Dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Peraturan lainnya tentang Pedoman Penyusunan APBD, Bidang Anggaran Daerah telah melakukan pengoordinasian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bidang Anggaran Daerah membantu TAPD dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penganggaran. Namun dalam pelaksanaannya masih didapatkan permasalahan.

Wawancara Bapak Fachrizal Kunto selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Bidang Anggaran Daerah pada 20 Agustus 2024, mengatakan bahwa: *“Permasalahan ini terdapat pada SDM (Sumber Daya Manusia) SKPD, juga ketepatan waktu dalam pelaksanaannya. Ketepatan waktu bisa dalam entri data di sistem.”* (Hasil wawancara 20 Agustus 2024). Berdasarkan wawancara tersebut dalam

proses pengoordinasian oleh Bidang Anggaran Daerah masih terdapat kendala. Permasalahan ini sejalan dengan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa dalam pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah masih belum memiliki ketepatan waktu dalam pelaksanaan rapat dengan SKPD. Lalu terdapat juga sistem SIPD-RI yang digunakan untuk menginput data, tetapi dalam pelaksanaannya sistem tersebut masih bermasalah karena sering eror akibat digunakan oleh seluruh pemerintah di Indonesia. Permasalahan SDM yang dalam hal ini SKPD terdapat SKPD yang masih bermasalah. Sulitnya SKPD dalam menindaklanjuti informasi yang telah diberikan. Dikutip dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026 dinyatakan bahwa koordinasi memang masih menjadi kelemahan di BPKAD Kota Palembang. Kurangnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas para pegawai.

Berdasarkan fenomena di atas, ternyata didapatkan permasalahan dalam proses pengoordinasian oleh Bidang Anggaran Daerah. Permasalahan ini berkaitan dengan Sumber Daya Manusia yaitu SKPD. Terdapat SKPD yang masih bermasalah. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas, serta sistem SIPD-RI yang sering eror yang masih menjadi tantangan dalam pengoordinasian di Bidang Anggaran Daerah. Sehingga dengan permasalahan ini pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD menjadi belum terpenuhi dengan baik.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk menjelaskan lebih detail mengenai “Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang”. Kajian ini terlihat melalui kondisi pengoordinasian penyusunan DPA-SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Dengan cara ini, hasil yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi para pegawai, membantu mereka melihat seberapa baik pengoordinasian yang mereka lakukan dan meningkatkan koordinasi dalam organisasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang?”.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD oleh Bidang Anggaran Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bahwa koordinasi pada Bidang Anggaran Daerah di BPKAD Kota Palembang dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Administrasi Publik tentang koordinasi pegawai. Hasil penelitian ini diharapkan

dapat menjadi pertimbangan suatu instansi atau pemerintah dalam menetapkan strategi-strategi terhadap peningkatan koordinasi pegawai.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan masukan dalam mencapai keberhasilan koordinasi dalam organisasi pemerintahan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ardelianto, B. R. (2022). Keberhasilan Koordinasi Pemimpin dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Ninja Xpress Mini Sort Hub Semarang. *Skripsi Universitas Semarang*, 1-102. Diambil kembali dari <https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/B11A/2017/B.131.17.0426/B.131.17.0426-15-File-Komplit-20220218024111.pdf>
- BPKAD Kota Palembang. (2023). Rencana Strategis 2024-2026 (Rancangan Akhir).
- Hasibuan, M. S. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maryana. (2023). *Buku Ajar Manajemen Keperawatan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Source Book*. United States of America: SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi, Febriani, S. A., & Anisa S, N. (2023). Prinsip Toeri Organisasi Klasik Menurut Henry Fayol. *Jurnal Manajemen Strategis (MANTRA)*, 1(1), 33-42.  
Diambil kembali dari  
<https://jurnal.desantapublisher.com/index.php/mantra/article/view/93>